

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah kabupaten Kudus

Cerita mengenai kabupaten Kudus, pastinya selalu melekat dengan cerita Sunan Kudus, yang mana memiliki nama asli Ja'far shoddiq. Beliau adalah tokoh yang mempunyai peranan penting dalam menegakan kota Kudus. Selain Sunan Kudus, Ja'far shodiq juga mempunyai julukan lain, karena kehandalan akan ilmu agama Islam yang dimiliki, akhirnya beliau dipercaya untuk membimbing para jamaah haji yang kemudian beliau mendapat gelar Amir Haji. Beliau pernah bertempat tinggal di Baitul Maqdis, yang mana mempunyai tujuan guna memperdalam ilmu agama Islam. Bersamaan dengan waktu itu, disana sedang dilanda pagebluk penyakit sehingga banyak orang yang meninggal. Adanya masalah tersebut, lantas membuat Sunan Kudus tidak tinggal diam beliau berusaha memberantas pagebluk tersebut dengan cara memberikan pengobatan kepada masyarakat yang sakit, sehingga atas ijin Allah masyarakat yang sakit banyak yang sembuh, dan tidak lama pagebluk tersebut dapat tertangani dengan baik. Atas kebaikan-kebaikan yang di lakukan akhirnya Sunan Kudus dihadahi suatu wilayah di Palestina.

Diberikannya hadiah suatu wilayah di Palestina untuk Sunan Kudus, tidak langsung diterima oleh Sunan Kudus, beliau mengutarakan agar hadiah untuknya bisa ditukar di pulau Jawa. Hal tersebut disetujui oleh pemimpin Palestina yang sekaligus sebagai gurunya dalam menimba ilmu. Selanjutnya Sunan Kudus kembali ke pulau Jawa dan menguasai serta memimpin wilayah yang dihadiahkan untuknya. Pada tahun 1956 H atau 1548 M, Sunan Kudus membangun masjid di wilayah Kudus. Dahulunya masjid yang dibangun itu dikenal dengan nama masjid Al manar atau masjid Al Aqso, meniru masjid yang bertempat di Yerussalem yang memiliki nama Masjidil Aqso. Yerussalem merupakan suatu kota yang populer dengan nama Baitul Maqdis atau Al-Quds. Berawal dari Al-Quds selanjutnya muncul kata Kudus yang sampai saat masih dipakai menjadi nama kota Kudus. Dahulunya kota Kudus dikenal dengan

nama Loaram, terbukti sampai saat ini masih ada desa di kota Kudus yang bernama Loram. Tidak hanya itu masjid yang pernah dibangun oleh Sunan Kudus yang sampai saat ini dikenal dengan nama masjid menara, bertempat di Kauman Kulon. Kata kauman berasal dari Sunan Kudus yang menetap di daerah tersebut, kemudian bertambah banyak orang yang memilih Islam sebagai agamanya. Lama-lama daerah disekeliling masjid menara tersebut, diberi nama kauman yang memiliki makna pemukiman orang-orang muslim.¹

b. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari banyak kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah. Letak kabupaten Kudus diapit oleh empat kabupaten yang mengelilinginya. Dari sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, dari selatan berbatasan dengan kabupaten Pati dan Grobogan dan dari sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Demak dan kabupaten Jepara. Kabupaten kudus mempunyai sembilan kecamatan yaitu, Jati, Kota, Kaliwungu, Dawe, Gebog, Bae, Mejobo, Jekulo dan Undaan.

Menurut letak astronomis kabupaten Kudus ada diantara 110°36'dan 150°50' bujur timur serta 6°51' 7°16'Lintang selatan. Jarak paling jauh dari barat sampai timur adalah 16 km serta dari utara ke selatan 22 km.²

c. Visi Misi Kabupaten Kudus

- 1) Visi
Kabupaten Kudus mempunyai visi “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera.
- 2) Misi
Dengan adanya visi yang dimiliki, kabupaten Kudus menerapkan misi, yaitu sebagai berikut:
 - a) Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif, dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

¹ Pemerintah Kabupaten Kudus, Profil Kabupaten Kudus, diakses 27 Mei 2023, https://www.kuduskab.go.id/page/profil_kabupaten_kudus.

² BPS kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023*, (Kudus: BPS Kudus, 2023), 3-4.

- b) Kabupaten Kudus pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
- c) Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
- d) Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.³

d. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus

Penduduk dalam halnya pembangunan memiliki peran ganda pertama sebagai subjek dan kedua sebagai objek dalam pembangunan. Sehingga dengan peran ganda yang dimiliki oleh penduduk, pantas dalam setiap sektor pembangunan selalu melibatkan data kependudukan. Pemerintah maupun swasta memerlukan data kependudukan guna sebagai bahan Perencanaan serta penilaian dari hasil kerja pembangunan. Pada tahun 2022 kabupaten Kudus memiliki penduduk yang berjumlah 856.472 jiwa yang terdiri dari 49.88% laki-laki dan 50.11% perempuan. Jumlah penduduk terbanyak sebesar 12.81% dimiliki oleh kecamatan Jati dan persentase penduduk paling sedikit ada di kecamatan Bae dengan 8.73%. *Sex ratio* kabupaten Kudus pada tahun 2022 berjumlah 99.54. Hal tersebut mengindikasikan jika terdapat 100 perempuan maka terdapat 99 penduduk laki-laki. Namun *sex ratio* tersebut berbeda-beda pada setiap kecamatan.⁴

Pada tahun 2022 angka angkatan kerja di kabupaten Kudus ada 501.120 jiwa. Terdiri dari 284.493 jiwa angkatan kerja laki-laki dan 216.587 angkatan kerja perempuan. Sedangkan yang bekerja hanya 485.048 jiwa, dengan 272.915 pekerja laki-laki dan 212.133 pekerja perempuan.⁵ Pada kabupaten Kudus status pekerjaan utama yang paling banyak jumlahnya yaitu sebagai buruh atau karyawan.⁶

e. Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Kudus

Peningkatan pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf kemakmuran pada masyarakat, biasanya akses pendidikan dapat ditempuh melalui bangku sekolah. Masyarakat kabupaten Kudus yang

³ Pemerintah Kabupaten Kudus, Visi dan Misi Kabupaten Kudus, diakses 27 Mei 2023, https://www.kuduskab.go.id/page/visi_dan_misi.

⁴ BPS kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023*, 32.

⁵ BPS kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023*, 38.

⁶ BPS kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023*, 41.

masih bersekolah di bawah naungan kementerian dan kebudayaan yaitu pada jenjang SD sampai SMA atau SMK pada tahun ajaran 2022/2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun mengalami kenaikan pada tahun ajaran yang sama pada jenjang MI sampai MA atau yang di bawah naungan kementerian Agama. Meningkatnya angka masyarakat kabupaten Kudus yang masih bersekolah di bawah naungan kementerian agama, sehingga diperlukan keselarasan tersedianya fisik dan tenaga pengajar yang berkompeten dibidangnya. Pada tahun ajaran 2022/2023 di kabupaten Kudus jumlah SD ada 424 unit, MI berjumlah 146 unit, SMP sebanyak 52 unit, MTS ada 69 unit, SMA ada 17 unit, SMK ada 29 unit dan MA sebanyak 40 unit.⁷

Selain pendidikan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat diraih dengan juga meningkatkan sarana kesehatan. Dengan fasilitas kesehatan yang mudah dicapai oleh masyarakat menjadikan kesehatan masyarakat akan terjaga. Kesehatan prima yang dimiliki oleh masyarakat akan dapat menghasilkan produktivitas yang lebih unggul dan secara tidak langsung program pembangunan telah terlaksana. Di kabupaten Kudus pada tahun 2022 terdapat sebanyak 7 buah untuk jumlah rumah sakit umum pemerintah dan swasta. Fasilitas kesehatan lainnya yang dengan mudah dapat dijangkau masyarakat kota hingga desa dalam memperhatikan kesehatan yaitu, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Pada tahun 2022 jumlah puskesmas ada 19 unit, selain itu banyak fasilitas kesehatan lain yang juga mudah dijangkau masyarakat seperti, pukesmas pembantu, puskesmas perawatan, puskesmas keliling, dan balai pengobatan yang telah tersedia di setiap kecamatan.⁸

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Data Upah Minimum Kabupaten Kudus

Menurut Mike dalam Nurul Pratiwi dan Eni Setyowati menyebutkan, ditetapkan upah minimum memiliki tujuan dapat mencukupi kebutuhan hidup terendah masyarakat, selain itu upah minimum juga merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mengangkat derajat

⁷ BPS kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023*, 49.

⁸ BPS kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023*, 49-50.

Masyarakat berpenghasilan kecil, terkhusus untuk pekerja yang kekurangan. Menaikan upah yang diberikan kepada pekerja, berarti juga menaikan penghasilan yang diterima oleh pekerja, sehingga nantinya mereka dapat mencukupi kebutuhannya. Dengan kebutuhan yang terpenuhi kesejahteraan akan diperoleh sehingga dapat terhindar dari kemiskinan.⁹

Tabel 4. 1 Upah Minimum Kabupaten

No	Tahun	UMK (Rp)	Kenaikan UMK (%)
1	2010	775 000.00	3.23 %
2	2011	840 000.00	8.38 %
3	2012	889 000.00	5.83 %
4	2013	990 000.00	11.36 %
5	2014	1 150 000.00	16.16 %
6	2015	1 380 000.00	20 %
7	2016	1 608 200.00	16.52 %
8	2017	1 740 900.00	8.19 %
9	2018	1 892 500.00	8.73 %
10	2019	2 044 467.00	8.03 %
11	2020	2 218 451.00	8.50 %
12	2021	2 290 995.00	3.27 %
13	2022	2 293 058.00	0.09 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel 4.1 yang telah dijabarkan di atas, memperlihatkan jumlah upah minimum kabupaten yang diberikan di setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun mengalami fluktuatif pada persentase kenaikan upah yang diberikan. Kenaikan upah minimum merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan seperti, untuk memberantas kemiskinan.

b. Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan produk terobosan dalam penilaian pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu acuan dalam mengukur pembangunan manusia. Apabila nilai IPM

⁹ Nurul Pratiwi dan Eni Setyowati, "Analisis Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah terhadap Kemiskinan di Karesidenan Surabaya Tahun 2015-2020," *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 22, no. 2 (2022): 13-23.

tinggi selarasnya angka kemiskinan harus rendah. Sejatinya IPM dengan kemiskinan harus berkorelasi negatif.¹⁰ Hal tersebut dikarenakan IPM merupakan salah satu kebijakan dalam pembangunan manusia, sehingga jika tercipta masyarakat yang mempunyai kompetensi unggul, jelas akan memberikan produktivitas tinggi dan secara tidak langsung akan mengurangi angka kemiskinan.

Tabel 4. 2 IPM Kabupaten Kudus

No	Tahun	IPM (%)
1	2010	69.22
2	2011	69.89
3	2012	70.57
4	2013	71.58
5	2014	72.00
6	2015	72.72
7	2016	72.94
8	2017	73.84
9	2018	74.58
10	2019	74.98
11	2020	75.00
12	2021	75.16
13	2022	75.89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus

Tabel 4.2 di atas menerangkan mengenai data indeks pembangunan manusia yang terus meroket dari tahun 2010 sampai tahun 2022. Dari tahun 2010 yang memiliki persentase 69.22% naik terus mengalami peningkatan sampai pada persentase 75.89% pada tahun 2022. Meningkatnya angka persentase indeks pembangunan manusia merupakan harapan bagi banyak orang khususnya bagi pemerintah, karena dengan meningkatnya persentase tersebut, menandakan program kerjanya dalam menangani masalah pembangunan manusia mendapatkan keberhasilan. Selain itu pemerintah kabupaten Kudus juga perlu mendapat apresiasi atas kinerjanya, karena dapat mempertahankan peningkatan persentase indeks pembangunan manusia

¹⁰ Rizky Febrian Saragih dkk., “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021”. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 71-79.

meskipun pada tahun 2020 sampai tahun 2022 dunia dilanda pandemi covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak covid-19, sehingga pada saat itu sektor perekonomian, sektor kesehatan, sektor pendidikan dan banyak sektor lain yang ikut terdampak, kemudian mengalami porak poranda.

c. Data Kemiskinan Kabupaten Kudus

Menurut Isdijoso dkk, dalam Ria Safitri dkk, mengungkapkan kemiskinan merupakan keadaan kekurangan daya dalam usaha mencukupi kebutuhan pokok agar bisa hidup secara layak. Pengukuran kemiskinan dapat dilakukan dengan pendekatan moneter yang cara kerjanya memanfaatkan data pengeluaran rumah tangga. Nantinya data pengeluaran ini dapat dibandingkan dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang dibutuhkan guna mencukupi kebutuhan hidup paling rendah. Batas yang dimaksud merupakan garis kemiskinan. Masyarakat yang pengeluaran rumah tangganya kurang dari batas garis kemiskinan, dapat diartikan sebagai masyarakat miskin atau kekurangan.¹¹

Tabel 4. 3 Kemiskinan Kabupaten Kudus

No	Tahun	Kemiskinan (%)
1	2010	9.01
2	2011	9.45
3	2012	8.63
4	2013	8.62
5	2014	7.99
6	2015	7.73
7	2016	7.65
8	2017	7.59
9	2018	6.98
10	2019	6.68
11	2020	7.31
12	2021	7.60
13	2022	7.41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus

¹¹ Ria Safitri dkk., “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah,” *IQTISHODUNA* 16, no. 1 (2020): 39-58.

Terlihat dalam tabel 4.3 di atas, menunjukkan angka kemiskinan pada tahun 2010 sampai tahun 2022 mengalami data yang fluktuatif. Tahun 2010 persentase kemiskinan berada pada angka 9.01% meningkat ke angka 9.45% pada tahun 2011. Selanjutnya mulai tahun 2011 sampai tahun 2019 perlahan-lahan angka kemiskinan kabupaten Kudus menunjukkan persentase yang terus menurun. Namun tahun 2019 sampai tahun 2021 kembali mengalami peningkatan akibat pandemi covid-19. Terjadinya pandemi covid-19 pada tahun tersebut, mengakibatkan banyak sektor di masyarakat yang mengalami kendala. Salah satu sektor tersebut, yaitu perekonomian. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian, memunculkan Pemutusan hubungan kerja secara masal, pengangguran merajalela dan akhirnya tercipta masalah baru angka kemiskinan yang meroket. Kemudian karena kegigihan dan tanggapnya pemerintah kabupaten Kudus dengan upaya yang dilakukannya guna menurunkan angka kemiskinan, akhirnya angka kemiskinan ditahun 2022 berhasil menurun.

3. Analisis Data

a. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah terkumpul. Adapun ringkasan mengenai uji asumsi klasik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4 Ringkasan Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil
Uji Normalitas	Hasil Uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan <i>asympt. Sig. (2-tailed)</i> yaitu 0,2.
Uji Heteroskedastisitas	Uji <i>Scatterplot</i> yang sudah dilakukan menjelaskan bahwa output dalam grafik titik-titik yang dihasilkannya menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dalam Uji Glejser yang sudah dilakukan membuahkan hasil bahwa seluruh signifikansi dalam variabel bebas lebih dari 0,05.

Uji Multikolinearitas	Hasil uji Multikolinearitas menjelaskan bahwa nilai tolerance kedua variabel bebas yaitu 0,973 dan nilai VIF keduanya 1,028.
Uji Autokorelasi	Hasil uji Durbin Watson menunjukkan angka 1,948.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data memiliki tujuan guna mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai data berdistribusi normal atau tidak.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov test*. Adapun landasan dalam penggunaan uji ini yaitu sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi (sig.) lebih dari ($>$) 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi secara normal.
- b) Apabila nilai signifikansi (sig.) kurang dari ($<$) 0,05 dapat dikatakan data tidak berdistribusi secara normal.¹²

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

N		13	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.30107289	
Most Extreme Differences	Absolute	.153	
	Positive	.114	
	Negative	-.153	
Test Statistic		.153	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.547	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.534
		Upper Bound	.560

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

¹² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 161.

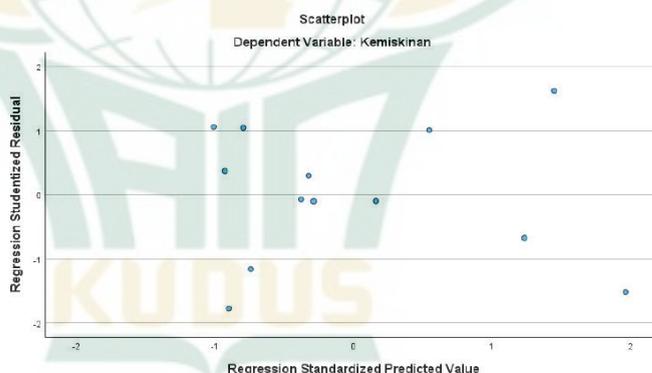
Dari tabel diatas terlihat mengenai output dari *one-sample kolmogorov smirnov test* yang menunjukkan asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,2 yang artinya lebih besar dari 0,05 ($0,2 > 0,05$) sehingga dapat ditafsirkan residual berdistribusi secara normal. Selain itu *output* ini juga menjelaskan tentang data yang berdistribusi secara normal.

2) Uji Heterokedastisitas

Sasaran dilakukannya uji heterokedastisitas yaitu ingin mengetahui apakah dalam model regresi terjadi perbedaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang layak digunakan yaitu yang terhindar dari heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *statistic scatter plot*. Adapun output uji heteroskedastisitas menggunakan uji *statistic scatter plot* yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Uji Statistic Scatter Plot



Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Dari hasil uji *scatter plot* yang sudah dijelaskan dalam gambar diatas, sehingga dapat ditemukan hasil bahwa tidak ditemukannya pola tertentu dalam gambar. Kondisi tersebut dapat dijelskan melalui penyebaran data yang terjadi secara acak, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Sehingga dapat disimpulkan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Selain itu uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila nilai signifikansi ditemukan lebih dari 0,05 maka diperoleh keputusan tidak terjadi heterokedastisitas.
- b) Apabila nilai signifikansi ditemukan kurang dari 0,05 maka diperoleh keputusan terjadi heterokedastisitas.¹³

Tabel 4. 6 Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	1.317	1.572		.838	.422
UMK	-.017	.008	-.546	-	.070
IPM	-.013	.021	-.161	-2.030	.564

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Dari tabel diatas telah dijelaskan bahwa dari dua variabel diatas, nilai signifikansinya sama-sama lebih dari 0,05 sehingga memberikan arti bahwa tidak terdapat heterokedastisitas.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan guna mempunyai sasaran untuk mengetahui apakah dalam model regresi diperoleh adanya korelasi diantara variabel bebas (independen). Model regresi yang layak digunakan yaitu yang terhindar dari masalah multikolinearitas diantara variabel independen. Adapun persyaratan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas, yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10 maka diartikan terbebas dari multikolinearitas.
- b) Apabila nilai *Tolerance* < 0,1 dan nilai *VIF* > 10 maka ditafsirkan terdapat mutikolinearitas.¹⁴

¹³ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, 137.

¹⁴ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, 108.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Constant		
Kenaikan UMK	0,973	1,028
IPM	0,973	1,028

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Dari hasil uji multikolinearitas yang sudah dilaksanakan diperoleh hasil bahwa dua variabel bebas yang digunakan mempunyai nilai *tolerance* 0,973 yang artinya lebih dari 0,1 dan nilai VIF 1,028 yang mengandung arti kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan dua variabel bebas diatas tidak terjadi multikolinearitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilaksanakan guna mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi yang terjadi diantara residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya pada model regresi. Dalam model regresi seharusnya tidak boleh ada autokorelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dapat dilaksanakan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-W Test). Adapun hasil dari uji Durbin-Watson (D-W Test) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin Watson

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.929 ^a	.862	.835	.32981	1.948

a. Predictors: (Constant), IPM, UMK

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Data sekunder diolah 2023

Dari hasil uji *Durbin Watson* dihasilkan 1,948. Sesuai dengan kaidah uji Durbin Watson dimana $du < d < 4 - du$ sehingga $1,5621 < 1,948 < 2,439$ ($4 - 1,5621 = 2,439$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dinyatakan model regresi terhindar dari masalah autokorelasi.

b. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Penggunaan uji regresi linear berganda dimaksudkan guna mengetahui secara statistik tentang hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga metode analisis ini nyambung dipakai pada penelitian ini.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	B
(<i>constant</i>)	33,666
Kenaikan UMK	-,030
Indeks Pembangunan Manusia	-,350

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 yang sudah dijelaskan diatas dapat dihasilkan persamaan regresi yaitu, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 33,666 - 0,030X_1 - 0,350X_2 + e$$

Dari nilai koefisien regresi dari variabel-variabel yang mempengaruhi rasio kemiskinan dengan memakai signifikansi $\alpha = 0,05$ dapat diinterpretasikan seperti berikut ini:

- 1) Nilai *constant* (a) yaitu 33,666. Nilai ini menunjukkan bahwa manakala tidak ada variabel bebas $X = 0$ maka kemiskinan memiliki angka 33,666.
- 2) Nilai koefisien regresi (b) pada model upah minimum kabupaten sebesar -0,030. Artinya jika variabel independen lain nilainya *constant* atau tidak berubah, dan data kenaikan upah minimum kabupaten mengalami peningkatan 1 satuan maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,030.
- 3) Nilai koefisien regresi (b) pada model indeks pembangunan manusia sebesar -0,350. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap atau tidak berubah, dan data indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan 1 satuan maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,350.

c. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat (dependen).

Tabel 4. 10 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.929 ^a	.862	.835	.32981	1.948

a. Predictors: (Constant), IPM, UMK

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Dari penelitian yang telah dilaksanakan mendapatkan hasil sesuai tabel diatas, dimana nilai Adjusted R Square diketahui ada 0.835 (83,5%) yang mana memiliki arti variabel independent atau variabel bebas memiliki kemampuan dalam menerangkan variabel dependen (kemiskinan) sebanyak 83,5% dan sisanya sebanyak 16,5% ($100\% - 83,5\% = 16,5\%$) diterangkan oleh variabel lain diluar variabel bebas yang telah digunakan dalam penelitian ini.

d. Hasil Uji F Simultan

Uji F dilaksanakan guna ingin mengetahui apakah seluruh variabel independent atau variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau serentak terhadap variabel dependen (kemiskinan). Untuk mengetahui hasil keputusan uji F adapun persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Manakala F hitung lebih besar dari ($>$) F tabel maka variabel independent mempunyai pengaruh.
- 2) Manakala F hitung lebih kecil dari ($<$) F tabel maka variabel independent tidak mempunyai pengaruh.

Tabel 4. 11 Hasil Uji F

F hitung	Sig.
31,288	0,001

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Dari penelitian yang telah dilaksanakan ditemukan hasil Fhitung sebesar 31,288 dan kemudian diperoleh F tabel sebesar 4,10. Sehingga dapat dinyatakan F hitung $>$ F tabel ($31,288 > 4,10$) dan nilai sig. $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independent atau variabel bebas secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

e. Hasil Uji T Parsial

Tabel 4. 12 Hasil Uji T

Model	T hitung	Signifikansi
(Constan)	10,329	0,001
Kenaikan UMK	-1,759	0,109
IPM	-7,897	0,001

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Tabel distribusi t ditemukan pada α 5% : $2 = 2,5$ % dengan uji dua sisi, memakai derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $13 - 2 - 1 = 10$, sehingga diperoleh t tabel sebesar 2,228. Apabila nilai t hitung $>$ t tabel maka menghasilkan keputusan H_0 ditolak dan H_a diterima. Namun sebaliknya jika t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

- 1) Kebijakan kenaikan upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan

Berlandaskan pada hasil uji t yang sudah dilaksanakan membuahkan hasil model kenaikan UMK memiliki t hitung $-1,759 <$ t tabel 2,228. Selain itu nilai signifikansinya 0,109 yang berarti lebih dari 0,05. Sehingga dapat dijelaskan H_0 diterima dan H_1 ditolak, dengan begitu kebijakan kenaikan upah minimum kabupaten tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2010-2022.

- 2) Kebijakan Indeks pembangunan Manusia terhadap kemiskinan

Berlandaskan pada hasil Uji t yang sudah dilaksanakan, membuahkan hasil bahwa model IPM mempunyai t hitung sebesar $-7,897 >$ t tabel 2,228. Selain itu nilai signifikansi yang dimiliki 0,001 yang artinya kurang dari 0,05. Karena t hitung bertanda negatif maka mengartikan bahwa terjadi hubungan negatif atau berlawanan. Hal ini menjelaskan bahwa kebijakan indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2010-2022. Sehingga dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_2 diterima.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Kebijakan Kenaikan Upah Minimum Kabupaten terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kudus Tahun 2010-2022.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan ditemukan hasil bahwa variabel kenaikan upah minimum kabupaten memiliki t hitung $-1,759$ yang artinya kurang dari t tabel $2,228$, selain itu nilai signifikansi yang dihasilkan $0,109$ yang berarti lebih dari $0,05$ sehingga dapat dinyatakan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hipotesis yang tertolak mempunyai makna bahwa kebijakan kenaikan upah minimum kabupaten Kudus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2010-2022.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh margaretha dkk, yang menemukan hasil penelitian bahwa kebijakan upah minimum kabupaten tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.¹⁵ Adapun penelitian ini berarti bertentangan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Kaufman dalam penelitian Sinta Ariska dkk, menyebutkan tujuan utama diputuskannya upah minimum adalah demi mencukupi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi dan kemakmuran pekerja. Upah minimum adalah upaya untuk meningkatkan kemakmuran penduduk berpenghasilan kecil, terutama para pekerja yang kekurangan. Sehingga kenaikan upah minimum nantinya dapat menaikkan penghasilan penduduk, yang kemudian dapat tercipta penduduk yang makmur, sejahtera, dan sentosa sehingga dapat mengentaskan masalah kemiskinan.¹⁶

Hasil penelitian yang menerangkan tidak adanya pengaruh kebijakan kenaikan upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus dikarenakan tidak semua penduduk kabupaten Kudus mendapatkan penghasilan sesuai nominal upah minimum kabupaten yang ditetapkan. Meskipun menurut data pada Kabupaten Kudus status pekerjaan dengan jumlah terbanyak ditempati oleh karyawan atau pegawai, namun tidak semua unit usaha menetapkan gaji sesuai dengan nominal upah minimum kabupaten. Perbedaan pemberian upah tersebut,

¹⁵ Margaretha Larasati Prayoga, dkk., "Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo," *Jambura Economic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 140

¹⁶ Sinta Ariska dan Sri Ulfa Sentosa. "Pengaruh inflasi, pendidikan, dan upah terhadap kesempatan kerja dan kemiskinan di Indonesia," 85.

bisa didasari dari jenis pekerjaan seseorang, ataupun dari penduduk yang menerima upah dari sistem harian, mingguan atau dengan sistem jam. Sehingga dari perihal tersebut dapat menjelaskan bahwa naik atau turunnya kebijakan dalam menaikkan upah minimum kabupaten tidak dapat memberikan pengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Kudus.

2. Pengaruh Kebijakan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kudus Tahun 2010-2022.

Dari hasil penelitian ditemukan hasil bahwa kebijakan indeks pembangunan manusia memiliki t hitung sebesar $-7,897 > t$ tabel $2,228$. dan nilai signifikansi yang dimiliki $0,001$ kurang dari $0,05$. Adapun t hitung bertanda negatif memiliki arti hubungan yang berlawanan antara indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan. Sehingga dapat dinyatakan H_0 ditolak dan H_2 diterima. Diterimanya hipotesis mengandung arti bahwa kebijakan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Karena mempunyai hubungan yang negatif atau berlawanan, sehingga jika indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan maka terjadi penurunan pada angka kemiskinan.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Kevin dan Zainal dimana tahun 2022 indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.¹⁷ Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Margaretha dkk, tahun 2022 yang mengungkapkan indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.¹⁸ Penelitian lain yang mendukung penelitian ini yaitu dari Moh. Nur Khaqiqi dan Tsalis Syaifuddin tahun 2021 yang juga membuktikan IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.¹⁹ Hasil penelitian ini mendukung teori yang diutarakan oleh Todaro dalam Kevin dan Zainal dimana pembangunan manusia memiliki tugas guna

¹⁷ Kevin Dwi Prasetyo dan Zainal Arifin. "Analisis Pengaruh TPT, UMP, Pertumbuhan Ekonomi, IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 6 no.2 (2022): 301.

¹⁸ Margaretha Larasati Prayoga, dkk., "Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo," 141.

¹⁹ Moh Nur Khaqiqi dan Tsalis Syaifudin, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, dan Upah Terhadap Kemiskinan," *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021):

mewujudkan suatu negara yang dengan mudah dapat menelaah teknologi modern agar terus dapat diproses dan terbentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga kemiskinan akan cepat teratasi.²⁰

Hasil penelitian pada kabupaten kudus menerangkan bahwa kebijakan indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal itu terwujud karena semakin banyaknya masyarakat yang mengerti akan pentingnya pendidikan serta kesehatan. Banyaknya fasilitas kesehatan yang diberikan pemerintah seperti kartu Indonesia sehat sehingga telah memudahkan masyarakat miskin dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Dengan kesehatan yang prima yang dimiliki, masyarakat akan semakin mudah dalam memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan pokok yang terpenuhi dapat memberikan angka kemiskinan yang menurun. Selain fasilitas kesehatan fasilitas tidak kalah penting untuk dilakukan peningkatan dan sekaligus sudah dilaksanakan pemerintah yaitu dengan pengadaan kartu Indonesia pintar yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu agar juga dapat menikmati fasilitas Pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, nantinya dapat memberikan keterampilan dan kemampuan masyarakat semakin lebih unggul dan nantinya dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Masyarakat dengan produktivitas tinggi akan semakin mudah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi juga. Dengan penghasilan yang tinggi kesejahteraan akan semakin mudah diperoleh dan angka kemiskinan akan semakin turun

²⁰ Kevin Dwi Prasetyo dan Zainal Arifin. “Analisis Pengaruh TPT, UMP, Pertumbuhan Ekonomi, IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa,” 301.